

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
PERIODE 2012-2018**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2019 M**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK
RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
PERIODE 2012-2018**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam



Oleh:

ROFIQOH HASANAH

NPM: 1551010280

Jurusan: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt. C.A.

Pembimbing II : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440/2019 M**

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan salah satunya melalui sumber penerimaan pelaksanaan pemungutan pajak pajak, diantaranya pajak reklame dan pajak restoran. Pengenaan pajak reklame dan pajak restoran disuatu daerah kabupaten/kota harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Pesawaran melalui pajak daerah, yang berdasarkan pada salah satu kaidah ushul fiqih menyatakan *kemashlahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemashlahatan yang khusus*. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran, serta bagaimanakah sudut pandang pemungutan pajak dalam ekonomi Islam. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran serta untuk menganalisis sudut pandang ekonomi islam mengenai pemungutan pajak. Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa *time series*, yang mana diperoleh dari arsip pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran periode 2012-2018. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y) dan variabel independen yaitu pajak reklame (X1) dan pajak restoran (X2). Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial pajak reklame (X1) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan pajak restoran (X2) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan, hasil uji F pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran. Dalam ekonomi islam sistem pemungutan pajak di Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan prinsip pajak yang adil dalam islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan umat serta menciptakan masyarakat yang *Maqasid Syariah*.

Kata Kunci: *Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE 2012-2018**

Nama : Rofiqoh Hasanah

NPM : 1551010280

Program Studi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt.,C.A. NIP. 197009262008011008

Hj. Mardhiah Hayati, SP., M.S.I. NIP.197605292008012010

Ketua Jurusan

Madnasir, S.E., M.S.I. NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul : **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2012-2018**, disusun oleh: **Rofiqoh Hasanah, NPM.1551010280**, Program Studi: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 24 Juni 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua sidang : Ahmad Habibi, S.E., M.E.

(.....)

Sekretaris : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.

(.....)

Penguji I : Femei Purnamasari, S.E., M.Si.

(.....)

Penguji II : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.”

(QS. Al-An'am:165)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua, Abi Zaiful Ramli dan Umi Ida Laila yang tiada henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya untukku, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan kepada ku karena telah memiliki orang tua yang tulus mencintaiku, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, yang selalu bekerja keras tak kenal letih dan bersabar dan yang selalu meyebutkan nama dalam setiap lantunan doanya, mereka adalah orang tua yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Umi dan Abi, Amin.
2. Adik-adikku yang aku sayangi A. Rizky Ihzan Yusuf yang sudah mengerti akan kehidupan terimakasih sudah memberikan doa, dukungan kepada kakak sulung ini, dan adik yang kedua M. Athafariz Faeyza Yusuf yang umurnya berbeda 20 tahun dengan diriku semoga tumbuh menjadi anak yang cerdas..
3. Alamamater kampus hijau UIN Raden Intan yang menjadi tempat menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Rofiqoh Hasanah dilahirkan di Negeri Sakti pada tanggal 12 November 1996, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Zaiful Ramli dan Ida Laila.

Pendidikan dimulai dari TK Diniyyah Putri Lampung dan lulus tahun 2002. Melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Palapa Bandar Lampung sampai tahun 2004 dan selesai pada tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri 5 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Diniyyah Putri Lampung selesai pada tahun 2011, dan Madrasah Aliyah (MA) Diniyyah Putri Lampung selesai pada tahun 2014. Selanjutnya mengikuti tingkat perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun tingkat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta sangat aktif diberbagai komunitas diluar kampus hijau.

Bandar Lampung, 24 Juni 2019

Penulis

Rofiqoh Hasanah
NPM.1551010280

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah serta tuntunan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan mendapat bantuan secara moril maupun materil dari semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Madnasir, S.E., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt. C.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam skripsi ini.

4. Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
7. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
8. Keluarga terdekat, Papah, Mamah, Kiyai yang sudah memberikan opi wejangan dalam mengerjakan skripsi, sepupu tercinta Zakiah Nisrina dan Aulia Fajriyati yang sudah memberikan motivasi, serta sepupu tertua panutanqu Hadhori yang sudah memberikan laptop dalam mengerjakan skripsi ini dikarenakan notebook ku rusak.
9. Para lelakiku Yunizar Alfiando, Agus Setia Pratama, dan Muhammad Fadly Akbar yang selalu mendukung, selalu ada kapanpun dimanapun berada dan memberikan semangat serta ikut membantu dalam skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/i Ekonomi Syariah angkatan 2015 khususnya kelas E, wabilkhusus Semleho Squad Elsa Devi, Ayu Avinda, Tri Susanti, Novita Purnama, Geby Resta, Sri Wahyuni, dan

Arini Wijayanti yang telah bersama-sama mengukir kenangan, pengalaman dan ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Para sobatku sejak SMP yang masih bertahan sampai saat ini Cut Rizki Indah, Siti Hartina, dan Zaeni Ahmad terimakasih atas tumpangan ngeprint gratisnya dan memberikan motivasi selama ini.

12. Sahabat-sahabat perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Teman-teman Kelompok Studi Pasar Modal Syariah, teman-teman Kelompok KKN 51, dan teman-teman Duta Bahasa Provinsi Lampung 2019 yang telah memberikan semangat selama ini. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Peneliti berharap hasil ini akan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keIslaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 24 Juni 2019
Penulis

Rofiqoh Hasanah
NPM.1551010280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	18
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	19
3. Teori Pembangunan Ekonomi.....	20
4. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	22

B. Konsep Pajak.....	25
1. Pengertian Pajak.....	25
2. Teori Pemungutan Pajak	28
3. Fungsi Pajak	30
4. Pembagian Jenis Pajak.....	31
5. Syarat Pemungutan Pajak.....	32
6. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	33
7. Sistem Pemungutan Pajak.....	34
C. Pajak Reklame.....	36
1. Pengertian Pajak Reklame.....	36
2. Dasar Hukum Pajak Reklame.....	37
3. Objek Pajak Reklame.....	38
4. Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	40
5. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame.....	40
D. Pajak Restoran.....	
1. Pengertian Restoran.....	44
2. Jenis-jenis Restoran.....	45
3. Produk Restoran.....	47
E. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame dan Pajak Restoran dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	48
1. Pendapatan Asli Daerah dalam Ekonomi Islam.....	48
2. Pajak Reklame dan Pajak Restoran dalam Ekonomi Islam.....	50
E. Penelitian Terdahulu.....	56
F. Kerangka Pemikiran.....	58
G. Hipotesis.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian.....	62
B. Sumber Data.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Populasi Dan Sampel.....	65
E. Devinisi Operasional Variabel.....	66

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	66
---	----

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	74
1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran.....	74
2. Perekonomian Kabupaten Pesawaran.....	76
3. Infrastruktur Kabupaten Pesawaran.....	76
4. Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.....	78
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.....	78
B. Gambaran Hasil Penelitian.....	80
C. Analisis Data.....	85
D. Pembahasan.....	98
1. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2018.....	98
2. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2018.....	100
3. Pemungutan pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	108

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	114
2. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018.....	12
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018.....	13
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018.....	14
Tabel 4.1 Daftar Bupati Pesawaran Beserta Periode Jabatan.....	78
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak reklame tahun 2012-2018.....	80
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018.....	81
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2018.....	82
Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restora terhadap PAD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018 (rupiah).....	84
Tabel 4.6 Uji Uji Normalitas.....	86
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	87
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	88
Tabel 4.10 Hasil Uji Linear Berganda.....	91
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	94
Tabel 4.12 Hasil Uji Simultan (F).....	96
Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	58
Gambar 4.9 Hasil uji heteroskedastisitas.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Pergantian Judul
2. Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 5.2 Tahun 2019 tentang penunjukkan dosen pembimbing skripsi mahasiswa semester genap tahun akademik 2018/2019
3. Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Skripsi
4. Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian oleh KESBANGPOL Kabupaten Pesawaran
5. Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Prariset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
6. Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Riset Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran
7. Lampiran 7 : Tabel Realisasi dan Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran beserta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2012-2018
8. Lampiran 8 : Data Olahan SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami skripsi ini, sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, disamping itu langkah ini merupakan proses ‘penajaman’ terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018”**

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada setiap negara yang terutang kepada wajib pajak baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.¹
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum

¹ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Andi OFFSET, 2011),h.23

terhadap barang, jasa, orang atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.²

3. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman.³
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lainnya.⁴

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

5. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang penerapannya dengan nilai-nilai Islam.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah bertujuan

² Mardiasmo, 2009, h.32

³ M.W Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.7

⁴ Kosasi, Eva Maria S dan Abdul Yusuf, *Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang*, Majalah Ilmiah Solusi Uniska, Vol. 1 Edisi 24, 2012

⁵ Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

⁶ Mustofa Edwin Nasution, et.al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. ke-3*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.15

untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran perspektif ekonomi islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif sebagai berikut:

1. Secara Obyektif

a) Reklame merupakan strategi yang cukup relevan untuk digunakan dalam memperkenalkan produk atau jasa. Pajak reklame di Kabupaten Pesawaran cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.73.034.712,00 atau pada 146,07%, kemudian di tahun 2013 menjadi Rp.82.171.750,00 setara dengan 164,34%, lalu 2014 mengalami penurunan sehingga pada angka Rp.70.305.250,00 atau pada 117,18%. Di tahun 2015 sebesar Rp.70.515.000,00 atau sebesar 100,74 dan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp.131.738.750,00 atau dalam persentase turun sebesar 65,87%. Selanjutnya tahun 2017 sebesar 237.250.549,00 atau 118,63%, dan pada tahun 2018 sejumlah 277.375.967,00 atau setara dengan 126,08%.

b) Pajak Restoran Kabupaten Pesawaran cenderung fluktuasi, tahun 2012 sebesar 53.857.400,00 atau 179,58%. Ditahun 2013 sebesar 47.165.500,00 atau 134,76%, tahun 2014 sebesar 54.960.600,00

atau 122,13, tahun 2015 sebesar 59.708.800,00 atau 119,42. Ditahun 2016 pada angka 557.301.580,00 setara dengan 111,46 ditahun 2017 meningkat menjadi 1.964.962.159,00 atau 115,59% dan pada tahun 2018 pada angka 2.391.395.586,00 atau 127,88 persen.

- c) Pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran cenderung fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan 2017, dan mengalami penurunan ditahun 2018. Pada tahun 2012 pada angka Rp.25.710.883.650,18 atau setara pada 174,71%, pada tahun 2013 sebesar Rp.25.933.059.036,15 setara dengan 122,33%, kemudian tahun 2014 sebesar Rp.36.482.436.458,71 atau 115,56%. Lalu pada tahun 2015 menjadi Rp.37.060.018.724,80 atau 95,82%, tahun 2016 sebesar Rp.41.956.848.582,55 pada angka 78,43%. Selanjutnya tahun 2017 sebesar 98.532.397.923,87 atau setara dengan 83,88% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sejumlah 60.656.666.456,02 yang setara pada 86,89%.

2. Secara Subyektif

- a) Untuk memperoleh data sebagai bahan utama pokok bahasan proposal ini sesuai berdasarkan jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang merupakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

- b) Untuk menambah wacana dalam rangka mendukung perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran.

C. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu contoh PAD adalah pajak daerah yang dipungut dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik

⁷ Jovanly Atteng, David Saerang, Lidya Mawikere, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015*, Jurnal Berkala Efisiensi, Vol.16, No.4, 2016

tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah. Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.⁸

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang diterima daerah. Keadaan ini menyebabkan perlunya dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah harus ditingkatkan, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif didalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.⁹

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

⁸ Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*, Jurnal Mutiara Akuntansi Vol.1, No.1, 2016

⁹ Nio Anggun Sripradita, Topowijono, Achmad Husaini, *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*, Jurnal e-Perpajakan, No.1 Vol.1, 2014

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.¹⁰

Pajak restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman.¹¹

Kabupaten Pesawaran merupakan pecahan dari beberapa daerah yang menuntut untuk memerlukan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah di berbagai sektor. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan, Kabupaten Pesawaran berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah yang diterima pemerintah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) pajak provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air

¹⁰ Sabil, *Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat*, Jurnal Moneter, Vo. IV, No.2, 2017

¹¹ M.W Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.7

bawah tanah dan air permukaan, 2) pajak kabupaten/kota meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan pajak parkir dan pajak lain-lain.

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat islam salah satunya berdasarkan kepada kemashlahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan *kemashlahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemashlahatan yang khusus*. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab Maliki. Al-Mashlahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus berupa nash-nash syara yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai kemashlahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemashlahatan dalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan mewujudkan kemashlahatan dalam setiap hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.¹²

Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian

¹² Muhammad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)*, Jurnal Al-'Adl, Vol.8, No.1, 2015

tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh

Negara.¹³ Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama pada agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.¹⁴

Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pencerminan suatu keadilan untuk kesejahteraan, dengan berlandaskan pada teori dan asas-asas perpajakan yang sifatnya universal. Seperti halnya pajak, dalam ajaran islam seorang yang sudah dikategorikan mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu dari harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat). Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan, yang semua itu dapat diperoleh dari mengeluarkan zakat, zakat juga bisa menumbuhkan kebersihan dan keberkahan. Zakat bukan hanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

¹³ Gustami, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h.31

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013) h.193

Ketaatan kepada pemerintah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Oleh karenanya timbul masalah dan hambatan mengenai persepsi kewajiban umat islam dalam hal pembayaran pajak dan zakat, yakni:

- a. Pajak adalah penarikan oleh negara terhadap warga negara tetapi penerimaan pajak itu dipakai untuk memenuhi kepentingan warga negara seluruhnya. Sedangkan zakat adalah transfer pendapatan kekayaan dari orang-orang yang kaya kepada yang miskin, yang membutuhkan serta kemaslahatan lainnya dan perkembangan agama.
- b. Pembayaran zakat tidak menerima kontra-prestasi sebagaimana pajak. Pajak (Kharaj) memang ada yang hanya dikenakan kepada non muslim.
- c. Masalah lain yang menjadi keberatan banyak muslim adalah karena mereka harus melakukan kewajiban ganda, yakni membayar pajak dan zakat,¹⁵ walaupun mereka menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang penyalurannya harus sesuai ketentuan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ



¹⁵ Muhammad Turmudi, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)*, Jurnal Al-Adl, Vol.8, No.1, 2015

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁶

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pajak reklame dan pajak restoran di Kabupaten Pesawaran untuk tahun 2012-2018, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

¹⁶ Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), h.196

Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018

Tahun	Target	Realisasi PAD	%
2012	14.715.956.000,00	25.710.883.650,18	174,71
2013	21.198.863.735,00	25.933.059.036,15	122,33
2014	31.569.771.251,35	36.482.436.458,71	115,56
2015	38.677.844.000,00	37.060.018.724,80	95,82
2016	53.493.336.600,00	41.956.848.582,55	78,43
2017	117.466.148.333,00	98.532.397.923,87	83,88
2018	69.806.945.718,00	60.656.666.456,02	86,89

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (diolah)

Dapat kita lihat dari tabel diatas, pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran cenderung fluaktif dari tahun 2012 sampai dengan 2017, dan mengalami penurunan ditahun 2018. Pada tahun 2012 pada angka Rp.25.710.883.650,18 atau setara pada 174,71%, pada tahun 2013 sebesar Rp.25.933.059.036,15 setara dengan 122,33%, kemudian tahun 2014 sebesar Rp.36.482.436.458,71 atau 115,56%. Lalu pada tahun 2015 menjadi Rp.37.060.018.724,80 atau 95,82%, tahun 2016 sebesar Rp.41.956.848.582,55 pada angka 78,43%. Selanjutnya tahun 2017 sebesar 98.532.397.923,87 atau setara dengan 83,88% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sejumlah 60.656.666.456,02 yang setara pada 86,89%.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	(%)
2012	50.000.000,00	73.034.712,00	146,07
2013	50.000.000,00	82.171.750,00	164,34
2014	60.000.000,00	70.305.250,00	117,18
2015	70.000.000,00	70.515.000,00	100,74
2016	200.000.000,00	131.738.750,00	65,87
2017	200.000.000,00	237.250.549,00	118,63
2018	220.000.000,00	277.375.967,00	126,08

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui bahwa penerimaan dari realisasi pajak reklame mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.73.034.712,00 atau pada 146,07%, kemudian di tahun 2013 menjadi Rp.82.171.750,00 setara dengan 164,34%, lalu 2014 mengalami penurunan sehingga pada angka Rp.70.305.250,00 atau pada 117,18%. Di tahun 2015 sebesar Rp.70.515.000,00 atau sebesar 100,74 dan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp.131.738.750,00 atau dalam persentase turun sebesar 65,87%. Selanjutnya tahun 2017 sebesar 237.250.549,00 atau 118,63%, dan pada tahun 2018 sejumlah 277.375.967,00 atau setara dengan 126,08%.

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	(%)
2012	30.000.000,00	53.875.400,00	179,58
2013	35.000.000,00	47.165.500,00	134,76
2014	45.000.000,00	54.960.600,00	122,13
2015	50.000.000,00	59.708.800,00	119,42
2016	50.000.000,00	557.301.580,00	111,46
2017	2.000.000.000,00	1.964.962.159,00	115,59
2018	1.870.000.000,00	2.391.395.586,00	127,88

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (diolah)

Berdasarkan tabel 1.3, diketahui bahwa penerimaan dari realisasi pajak restoran Kabupaten Pesawaran cenderung fluktuasi, tahun 2012 sebesar 53.857.400,00 atau 179,58%. Ditahun 2013 sebesar 47.165.500,00 atau 134,76%, tahun 2014 sebesar 54.960.600,00 atau 122,13, tahun 2015 sebesar 59.708.800,00 atau 119,42. Ditahun 2016 pada angka 557.301.580,00 setara dengan 111,46 ditahun 2017 meningkat menjadi 1.964.962.159,00 atau 115,59% dan pada tahun 2018 pada angka 2.391.395.586,00 atau 127,88 persen.

Visi Kabupaten Pesawaran yaitu Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-Cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera. Untuk di Kabupaten Pesawaran sendiri, sumber dari pendapatan asli daerahnya yakni mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu penerimaan yang ada di Kabupaten Pesawaran yakni pajak daerah, dalam hal ini termasuk industri alam yang menawarkan beragam jenis hal kreatif sehingga mampu mendorong pendapatan asli daerah yang sejalan dengan misi

ke tujuh Kabupaten Pesawaran yakni Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat. Substansi pajak daerah antara lain pajak reklame dan pajak restoran. Hal ini pula sesuai dengan misi pertama Kabupaten Pesawaran yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terpercaya dan Melayani. Yang menjadi masalah adalah apakah optimalisasi jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak sudah terealisasi dan sesuai dengan misi yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran? Berdasarkan hal yang dipaparkan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran?
3. Bagaimana sudut pandang pemungutan pajak dalam ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.
- b. Untuk menganalisis sudut pandang ekonomi islam mengenai pemungutan pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Bagi pihak manajemen dinas pemerintahan Kabupaten Pesawaran penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kinerja dinas pemerintahan.
- 2) Bagi akademik memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama pada bidang ekonomi Islam tentang penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel serta segala aspek berkenaan dengan ekonomi yang berbasis syariah dan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya agar lebih kompleks.
- 3) Bagi penyusun sebagai pendalaman ilmu yang telah didapatkan penyusun selama duduk di bangku kuliah sehingga dapat mengaplikasikan teori dalam masalah-masalah yang ada.

b. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam berkontribusi untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran, dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam prinsip syariah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁷ Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.¹⁸

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²⁰

Berdasarkan uraian diatas maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.44

¹⁸ Audie O Nide, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*, Skripsi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, (Manado, 2013), h.247-248

¹⁹ Abdul Halim, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: STIM YKPN), h.113

²⁰ Hadi, Sasana, *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 18, No.1, 2011

undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu agar terciptanya peningkatan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat pada pasal 1 Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Teori Pembangunan Ekonomi

a. Ekonomi Klasik

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*". Inti ajaran smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan

seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment*, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Kebijakan pasar bebas dan pengurangan campur tangan pemerintah (*laissez faire*) dianggap mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut karena adanya campur tangan tersebut hanya akan mengganggu bekerjanya mekanisme pasar.²¹

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan yaitu: masa berburu; masa beternak; masa bercocok tanam; masa perdagangan; tahap masa industri. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting.²²

b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik ini dikemukakan oleh Solow-Swan yang menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi

²¹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.47

²² *Ibid*

capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital dan tenaga kerja.²³

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri/mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini membuat teori mereka dan pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka dinamakan pemikiran teori neo-klasik. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitasnya per kapita meningkat.²⁴

c. Teori Ekonomi Islam

Mawardi (450 H/1058H M) membahas tentang pemerintah dan administrasi berisi tentang kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah (negara dan masyarakat), hak prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, kewajiban untuk mengawasi pasar, menjamin ketepatan timbangan dan berbagai ukuran lainnya, serta

²³ Robinson Tarigan, *Op.Cit.* h.52

²⁴ *Ibid.*

mencegah penyimpangan transaksi dagang dan pengrajin dari ketentuan syariah.²⁵

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini ditulis atas permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, ushr, zakat, dan jizyah. Kitab *Al-Kharaj*, mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertahanan, perpajakan, dan peradilan.²⁶

4. Sumber Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Menurut Marihot pajak daerah ialah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.²⁷ Selanjutnya menurut Syafrizal pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

²⁵ Ekonomi Islam, P3EI, Ed-1Cet.6, h.108

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Maribot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.7

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸

Berdasarkan definisi diatas, pajak daerah merupakan pajak yang berasal dari daerah yaitu iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah sebagai bentuk kontribusi tanpa adanya imbalan langsung yang diberlakukan oleh undang-undang yang bersifat memaksa.

b. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁹ Menurut Ahmad Yani retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁰ Menurut Saragih adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan aau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³¹

²⁸ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.393

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2011), h.15

³⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.63

³¹ Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghallia Indonesia, 2003), h.65

Berdasarkan definisi diatas, maka retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk iuran yang dipungut dan langsung mendapatkan imbalan atas pembayaran retribusi tersebut.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.³² Undang-Undang No.3 Tahun 2014 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.³³

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan

³² Ahmad Yani, h.73-74

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 11 Mei 2019

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.³⁴ Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemandaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.³⁵

B. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000, Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pasal 1 ayat 7 pasal 1 ayat 26. Tersedia di www.djpk.kemenkeu.go.id diakses 11 Mei 2019

³⁵ Aries A Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), h.99

³⁶ Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di Indonesia*, (Surabaya: Erlangga, 2014) h.4

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan menurut beberapa ahli, namun pengertian tersebut memiliki tujuan dan inti yang sama.

Menurut Djajadiningrat pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadilan, terus kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.³⁷

Pajak adalah iuran yang dikumpulkan dari masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁸

Menurut Rochmat Soemitro mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar

³⁷ Waluyo, *Perpajakan Teori dan Kasus*, edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.7

³⁸ Hikmah, *Analisis Kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam*, Jurnal Of Government-JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), Vol.2, No.2, 2017

pengeluaran umum.³⁹ Selanjutnya menurut S.I Dajadmingrat pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁴⁰

Dari definisi tersebut, pajak ialah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga negara atas sebagian harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung.



2. Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan, serta keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti

³⁹ Rachmat, Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Erosco, (Bandung: 2008), h.1

⁴⁰ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h.1

halnya perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran berupa premi.

b. Teori Kepentingan

Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara. Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya.⁴¹

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya yaitu dalam bentuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini, diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan tersebut dalam bentuk pajak. Yang menjadi dasar teori ini adalah rasa keadilan yaitu beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul tersebut dapat diukur dengan melihat besarnya penghasilan dan kekayaan atau melebihi pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.

d. Teori Bakti

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.31

Mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, karena penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

Teori berdasarkan paham *organische staatleer*. Diajarkan bahwa justru karena sifat negara inilah, maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak.⁴²

e. Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa, yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Tentu ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.⁴³

f. Teori Pembangunan

⁴² *Ibid*, h.32

⁴³ *Ibid*, h.34

Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁴

3. Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Berikut dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.⁴⁵

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengonsumsi gaya hidup konsumtif; Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.⁴⁶

4. Pembagian Jenis Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 bagian. yaitu: pajak negara dan pajak daerah.

⁴⁴ *Ibid*, h.35

⁴⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2008), h.1

⁴⁶ *Ibid*, h.3

a. Pajak Negara

Pajak Penghasilan (PPh); Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn Bm); Bea Meterai; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).⁴⁷

b. Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Pajak provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air; Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaran diatas air; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan.
- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari berikut: Pajak hotel; Pajak restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak penerangan jalan; Pajak pengambilan bahan galian golongan C; Pajak parkir.⁴⁸

5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

⁴⁷ *Ibid*, h.11

⁴⁸ *Ibid*, h.13

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.⁴⁹

6. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *A Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Equality* adalah pembebanan pajak di antara pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang ada di bawah perlindungan pemerintah. Jika *Equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, wajib pajak harus diperlakukan sama an dalam keadaan berbeda, wajib pajak harus diperlakukan berbeda.
- b. *Certainty* adalah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini,

⁴⁹ *Ibid*, h.2

kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

- c. *Convenience of payment* adalah pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan keuntungan yang dikenakan pajak.
- d. *Economic of collection* mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak akan ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang diperoleh.⁵⁰

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, sampai dengan tahun 1967, ada beberapa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah: Wewenang untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang pada fiskus; Wajib pajak bersifat pasif; Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

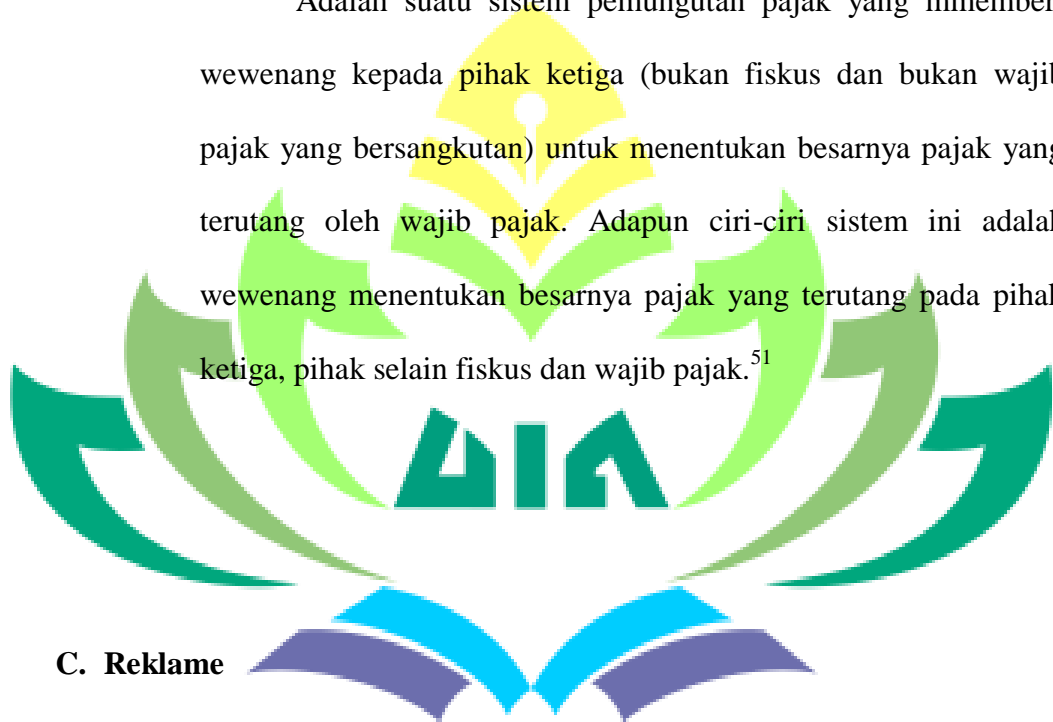
b. *Self Assessment System*

⁵⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.25

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib sendiri; Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mmemberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.⁵¹



C. Reklame

1. Pengertian Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

⁵¹ Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005), h.10

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang/badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum.⁵²

Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No.18 tahun 1997 dan telah diperbaharui dengan UU No.34 tahun 2000. Pembaharuan undang-undang di dasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah atau Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensi di daerah. Hal ini dimaksud untuk memberi keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.⁵³

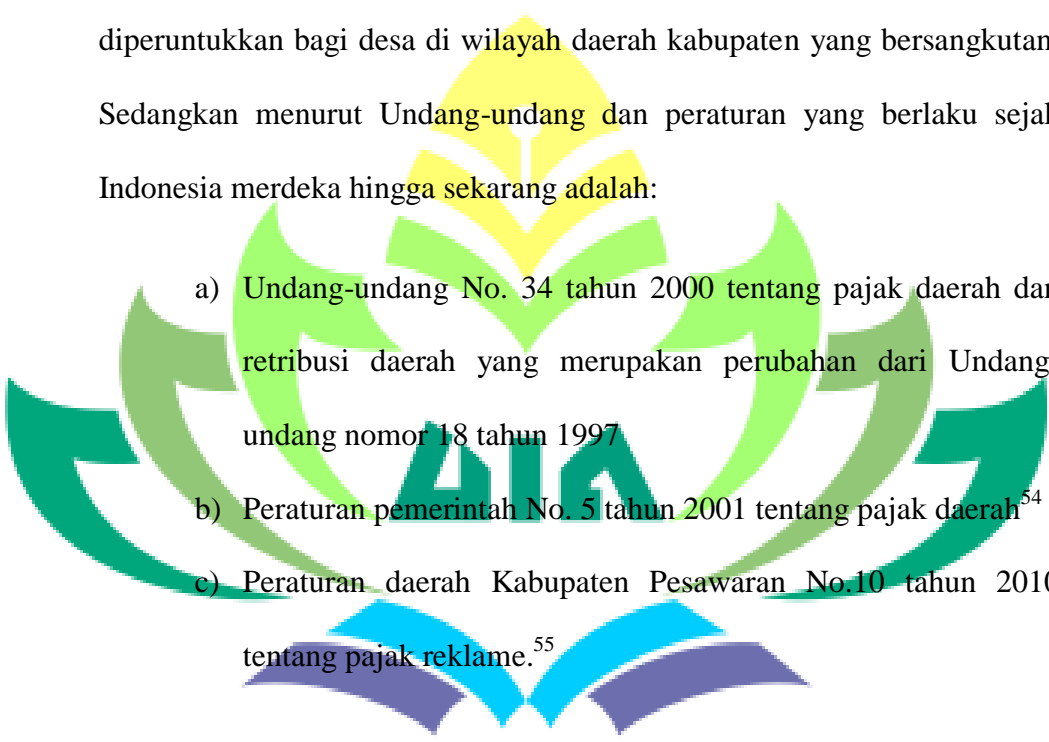
2. Dasar Hukum Pajak Reklame

⁵² Mardiasmo, h.95

⁵³ Mariot P. Sihan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*, (Bandung: Rajawali Pers, 2009), h.33

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah, peraturan pemerintah No.65 tahun 2001, peraturan daerah Kabupaten Pesawaran No.10 tahun 2010 tentang pajak reklame.

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku sejak Indonesia merdeka hingga sekarang adalah:

- 
- a) Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 18 tahun 1997
 - b) Peraturan pemerintah No. 5 tahun 2001 tentang pajak daerah⁵⁴
 - c) Peraturan daerah Kabupaten Pesawaran No.10 tahun 2010 tentang pajak reklame.⁵⁵

Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak daerah yang umumnya dan pajak reklame pada khususnya juga akan meningkat.

⁵⁴ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga), h. 389

⁵⁵ JDIH Pemerintah Kabupaten Pesawaran, tersedia di jdih.pesawarankab.go.id diakses pada 20 Mei 2019

Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggara reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.

3. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Menurut peraturan daerah Kabupaten Pesawaran No.10 tahun 2010 tentang pajak reklame dan Peraturan Bupati No 9 tahun 2017 tentang mekanisme dari perda pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya; Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan termasuk pada kendaraan ; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan.⁵⁶

Semua reklame yang termasuk dalam kategori diatas adalah objek pajak reklame. Prinsip pajak reklame mencerminkan keadilan ditujukan oleh pengecualian terhadap objek yang tidak dikenakan pajak karena secara teoritis harus mempertimbangkan Overhead Ekonomi.

Pada pajak reklame tidak semua penyelenggaraan reklame dikenai pajak ada pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran, Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Reklame

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, dan sejenisnya.
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dengan sejenis lainnya.
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- e) Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan
- f) Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.⁵⁷

4. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pesawaran No.10 tahun 2010 tentang Pajak Reklame Bab II Pasal 4, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang atau badan tersebut. Dalam

⁵⁷ Peraturan Bupati Pesawaran, Nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran

hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.⁵⁸

5. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame

a. Aturan Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame

Pelaksanaan pajak reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktiknya umumnya kepada Badan Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha penyelenggaraan reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka yang ditentukan, maka kepala badan pendapatan keuangan daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan, penetapan tersebut dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan penetapan besarnya wajib pajak ditetapkan oleh bupati/walikota dengan surat keputusan. Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu mendeskripsikan pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran, Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Reklame

kewajiban, menurut peraturan perundang-undnagan perpajakan daerah. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD disini adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. SKPD dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak tentang dalam SKPD. Eajib pajak dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.⁵⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 tahun 2010 Bab IV Pasal 9 tentang tata cara penetapan dan pembayaran pajak reklame (data terlampir);

- a) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui bank atau Badan sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

⁵⁹ Dini Nurmayasari, *Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010. Tersedia di eprints.undip.ac.id diakses pada 20 Mei 2019

- b) Apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Badan, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 jam
- c) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).⁶⁰

b. Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pemungutan Pajak Reklame

Tarif pajak reklame dikenakan atas objek reklame adalah paling tinggi sebesar dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bab III Pasal 6 Ayat 1, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nilai Sewa Reklame (NSR)

⁶⁰ Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010

didasarkan atas Nilai Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame;

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

Penjelasan:

NSR : Nilai Sewa Reklame

NJOPR : Nilai Objek Pajak Reklame

NSPR : Nilai Strategis Pemasangan Reklame.

Dan pada pasal 7 bahwasannya tarif pajak reklame sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).⁶¹

D. Restoran

1. Pengertian Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makanan maupun minuman. Terdapat banyak definisi mengenai restoran.

Restoran merupakan suatu tempat dimana seseorang yang datang menjadi tamu yang akan mendapat pelayanan untuk menikmati makanan, baik pagi, siang ataupun malam sesuai dengan jam bukanya dan oleh tamu

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran, Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Reklame

yang menikmati hidangan itu harus membayar sesuai dengan harga yang ditentukan dan sesuai dengan daftar yang disediakan di restoran itu.⁶²

Menurut Soekresno, restoran adalah suatu usaha komersial yang menyediakan pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional.⁶³

Menurut Atmojo, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman.⁶⁴

Restoran adalah suatu usaha, karena itu kita harus tahu pasti bagaimana mengolahnya, bagaimana membuat tamu-tamu senang dan puas sehingga mereka selalu berkeinginan untuk menjadi langganan restoran. Banyak usaha dan upaya yang harus ditempuh agar tujuan operasi restoran dapat terwujud dengan baik.

2. Jenis-jenis Restoran

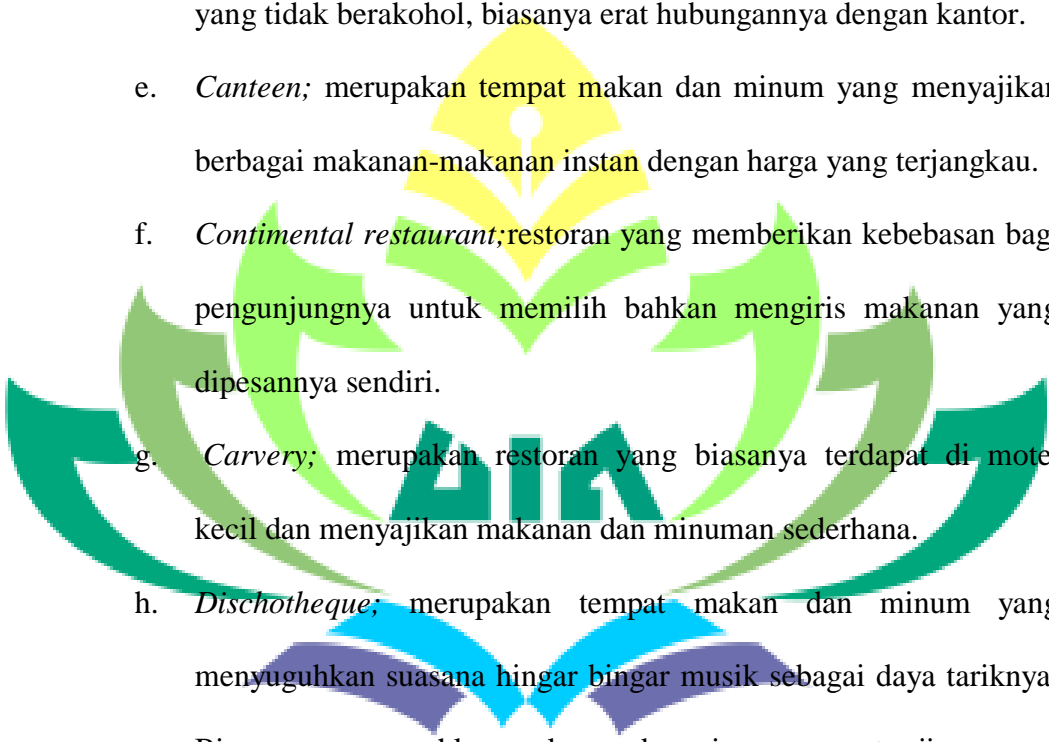
Berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *A la carte restaurant*; menu lengkap dan merupakan restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.

⁶² Dwiarko Nugroho, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja sektor Perhotelan dan Restoran di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.6, No.2 2014

⁶³ Soekresno, *Management Food and Beverage, Service Hotel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000)

⁶⁴ M.W Atmodjo, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h.7

- 
- b. *Table d'hotel*; restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
 - c. *Coffe shop*; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan racikan kopi sebagai menu special di luar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
 - d. *Cafetaria*; merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak berakohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.
 - e. *Canteen*; merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.
 - f. *Continental restaurant*; restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
 - g. *Carvery*; merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
 - h. *Dischotheque*; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya. Biasanya menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.
 - i. *Fish and chip shop*; restoran yang menyajikan menu ikan dan kripik atau snack sebagai menu utama.
 - j. *Grill room*; restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu sebagai menu andalan.

- k. *Intavern*; restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
- l. *Pizzeria*; restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
- m. *Creeperie*; restoran yang menyajikan berbagai menu kreps dan manisan.
- n. *Pub*; restoran yang menjual minuman berakohol.
- o. *Café*; tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.
- p. *Specially restaurant*; merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoran lain.
- q. *Terrace restaurant*; merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel.
- r. *Gourment restaurant*; merupakan tempat makan dan minum yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.
- s. *Family restaurant*; merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.

- t. *Main dining room*; merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat dihotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya prancis maupun rusia, dan orang-orang yang datang pada umumnya menggunakan pakaian resmi formal.⁶⁵

3. Produk Restoran

Produk yang dihasilkan restoran adalah totalitas dari makanan, minuman, dan seperangkat atribut lainnya, termasuk didalamnya rasam warna, aroma makanan, harga, nama makanan dan minuman, reputasi restoran, serta jasa pelayanan dengan keramah-tamahan yang diterima guna memuaskan keinginan pelanggan. Secara umum terdapat tiga komponen produk yang dipasarkan oleh restoran, yaitu: makanan dan minuman; pelayanan (*service*); suasana (*ambience*).⁶⁶

E. Pendapatan Asli Daerah dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pendapatan Asli Daerah dalam Ekonomi Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syariat islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin

⁶⁵ *Ibid*, h.9-10

⁶⁶ Soekreno, *Management Food...* h.8

kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan public untuk rakyatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Public Utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.⁶⁷

Dalam pemikiran islam menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.⁶⁸

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam yaitu islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi

⁶⁷ Nurul Huda dkk, *Keuangan Politik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.1

⁶⁸ Nurul Huda, h.190

islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.⁶⁹

Menurut Huda, disamping penerimaan negara yang pokok, pemerintah negara muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti *wakaf* (pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu *kalalah* (bagian negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya. Jika kebutuhan public belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun negara lain yaitu *sukuk*.⁷⁰

2. Pajak dalam Pandangan Ekonomi Islam

a. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata (dhariba, yadhribu, dharban), yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁷¹ Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.⁷²

⁶⁹ *Ibid*, h.191

⁷⁰ Nurul Huda dkk, h.35

⁷¹ Gusfahmi, *Loc.Cit*, h.28

⁷² *Ibid*, 28

Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya dikategorikan *dharibah*.⁷³

Pengertian pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁷⁴

Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.⁷⁵

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan

⁷³ *Ibid*, 28

⁷⁴ Mardiasmo, *Loc. Cit*, h.15

⁷⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), diakses dari staff.uii.ac.id pada tanggal 16 Mei 2019.

dan pos-pos pengeluaran yang memang diajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.⁷⁶ Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih tepat dan dekat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

- a) Diwajibkan oleh Allah Swt
- b) Obyeknya harta
- c) Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

b. Prinsip-prinsip Pendapatan dan Pengeluaran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana halnya penerimaan negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati Ulil Amri penerimaan negara yakni sebagai berikut:

- a) Harus adanya nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b) Adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin

⁷⁶ Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Pustaka Bandung Bab Bharobah, h.815

- c) Harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.⁷⁷

Adapun prinsip pengeluaran negara menurut negara sistem ekonomi islam sebagai berikut:

- a) Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt
- b) Apabila ada kewajiban tambahan maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungutan
- c) Adanya pemisah antara pengeluaran yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat adanya harta.
- d) Pengeluaran negara harus hemat.⁷⁸

c. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Ekonomi Islam

Kepatuhan wajib pajak tak lepas dari tinjauan ekonomi islam, khususnya dalam pendistribusian Indonesia. Kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan Zakat. Dimana kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ekonomi islam berdasarkan nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut:

- a) Nilai Kesadaran

⁷⁷ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h.121

⁷⁸ *Ibid*

Kesadaran untuk menunaikan wajib pajak bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat sejahtera. Hal ini karena membayar kewajiban-kewajiban membayar pajak merupakan proses utama dalam sistem keuangan negara dan sejalan dengan konsep distribusi islam. Dimana uang negara guna mensejahterakan masyarakat bukan untuk mensejahterakan kalangan atas.

b) Nilai Kewajiban

Nilai kewajiban dalam membayar pajak memiliki kesamaan dengan zakat, dimana kewajiban membayar pajak guna adanya pemerataan. Tidak untuk kalangan atas melainkan merata keseluruh umat. Bedanya membayar zakat dengan pajak ialah jika pajak berupa uang tunai tetapi zakat berupa uang tunai dan barang. Kewajiban membayar pajak ini juga guna kesejahteraan yang ukurannya ditentukan dalam keadaan manusia.

Selain zakat atau ushr yang merupakan salah satu sumber keuangan negara menurut islam, disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang minyak, batubara, timah, emas, dan sebagainya yang menjadi milik negara. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Selain zakat masih bisa dikumpulkan infaq dan shadaqah.

Selain itu, dapat juga berupa pajak yang dapat dikenakan pada semua warga negara, karena sasaran pajak lebih luas, mencakup segala hal yang dibiayai oleh negara.⁷⁹ Pajak yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana untuk kepentingan perjuangan atau negara, secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁸⁰

Menurut islam, setiap warga negara yang sudah dewasa dan memiliki penghasilan pada umumnya sudah dikenakan pajak, besar atau kecil. Dalam hal ini realisasi pajak dapat dihubungkan dengan empat norma perpajakan yaitu:

- a) Norma persamaan, dimana setiap warga negara dari suatu negara sedapat mungkin atau dengan kesanggupan harus menyumbang untuk menyokong pemerintah, sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh dengan pelindung negara, norma kepastian, artinya pajak yang harus dibayar seseorang

⁷⁹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.63

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.31

adalah pasti dan tidak dapat ditetapkan secara sewenang-wenang.

- b) Norma kemudahan yang menyatakan bahwa setiap pajak harus direncanakan sedemikian rupa sehingga hanya mengambil dan menyingkirkan dari kantong rakyat sendiri mungkin, disamping yang dimasukkannya kedalam perbendaharaan negara, dan norma ekonomi, dimana pajak harus konsisten dengan norma ekonomi dan produktivitas karena dikenakan pajak pada uang yang menganggur dalam bentuk pajak dengan sendirinya menyalurkan hasil pajak itu disamping produksi, sehingga pada gilirannya dapat menambah kekayaan nasional suatu negara.⁸¹

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembandingan dalam penelitian, untuk itu bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nuzul Fitri tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014,

⁸¹ Nurul Huda dkk, h. 64

menyimpulkan bahwa secara parsial pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang tahun 2009-2014 dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang tahun 2009-2014. Secara simultan pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.⁸²

Selanjutnya penelitian oleh Elly Lilis Pujiastuti dan Muhammad Tahwin tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, menyimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati dan pajak reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.⁸³

Dan hasil penelitian oleh Joko Rianto tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten tangerang (Periode 2011-2015), menyimpulkan bahwa hasil dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap

⁸² Nuzul Fitri, *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014*, Jurnal Elektronik Umrah 2016

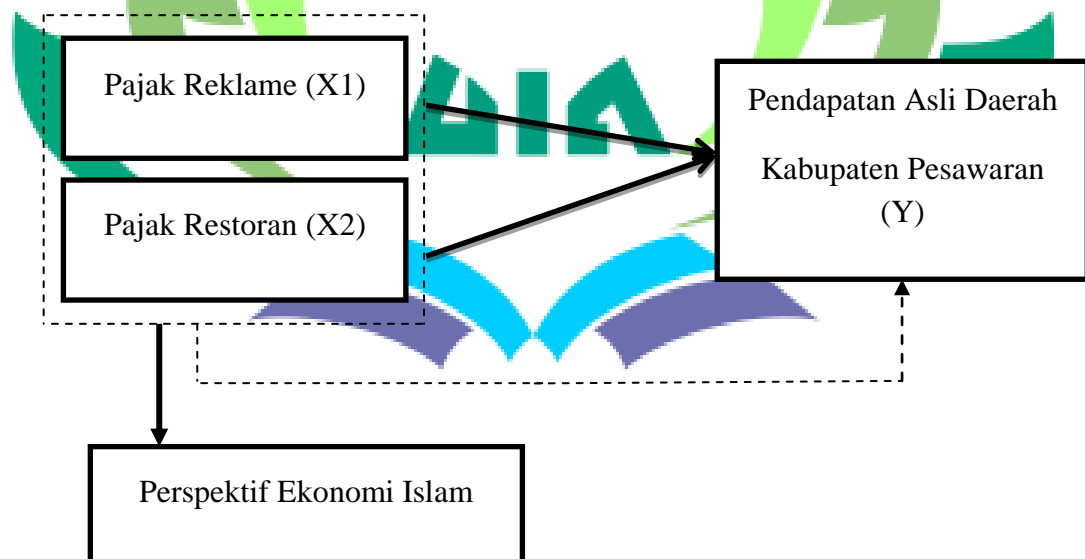
⁸³ Elly Lilis Pujiastuti dan Muhammad Tahwin, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati*, JAB, Vol.2 No.2, 2016

pendapatan asli daerah sebesar 98,5% sedangkan sisanya 1,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.⁸⁴

G. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



⁸⁴ Joko Rianto, *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten tangerang (Periode 2011-2015)*, Jurnal Ekonomi Bisnis No.XXVII, Vol.2, 2017

—————▶ : Secara Parsial - - - - -▶ : Secara Simultan

Apabila pajak reklame dan pajak restoran mengalami peningkatan baik secara jumlah dan kualitas maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mencerminkan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keterkaitan pajak reklame dan pajak restoran akan pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan peningkatan output. Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh pajak reklame (X1) dan pajak restoran (X2) sebagai pendorong pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran (Y), selanjutnya pemungutan pajak akan di analisis dalam prespektif ekonomi islam.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara dua variable atau lebih.⁸⁵

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka dan merupakan uraian sementara dari permasalahan yang perlu diujikan kembali. Suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data empiris membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar, begitu pula sebaliknya. Adapun hipotesis hasil penelitian dari

⁸⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), h.68

1. Nuzul Fitri tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014 sebagai berikut:

- a. Secara parsial pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang tahun 2009-2014
- b. Secara parsial pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang tahun 2009-2014
- c. Secara simultan pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.⁸⁶

2. Elly Lilis Pujiastuti dan Muhammad Tahwin tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati sebagai berikut:

- a. Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati
- b. Pajak reklame berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pati.⁸⁷

⁸⁶ Nuzul Fitri, *Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014*, Jurnal Elektronik Umrah 2016

⁸⁷ Elly Lilis Pujiastuti dan Muhammad Tahwin, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati*, JAB, Vol.2 No.2, 2016

3. Joko Rianto dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten tangerang (Periode 2011-2015), sebagai berikut:

- a. Uji t terhadap pajak reklame memiliki t hitung 1,995 dengan signifikansi 0,051 dan t tabel berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Uji t terhadap pajak restoran memiliki t hitung 2,966 dengan signifikansi 0,004 dan t tabel sebesar 2,00324 artinya variabel pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
- c. Uji f terhadap pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 98,5% sedangkan sisanya 1,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.⁸⁸

Hipotesis pada penelitian ini adalah:

- 1) Ho : Pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran
Ha : Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran
- 2) Ho : Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

⁸⁸ Joko Rianto, *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten tangerang (Periode 2011-2015)*, Jurnal Ekonomi Bisnis No.XXVII, Vol.2, 2017

Ha : Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

3) Ho : Pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

Ha : Pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* (penelitian eksplanatori) dengan metode pendekatan secara kuantitatif. Penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan (kausalitas) antar variabel, melalui pengujian hipotesis.⁸⁹ Kuantitatif adalah ketika variabel yang diteliti dapat dinyatakan dengan angka. Variabel kuantitatif dalam

⁸⁹Solimun, Adji Ahmad, Dkk, *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS*, (Malang: UB Press, 2017), h. 10.

penelitian ini adalah menggunakan variabel berwujud kontinu. Variabel kontinu didapat dari pengukuran.⁹⁰

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian jenis kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁹¹

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data sekunder. Data-data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹² Data sekunder mempunyai dua macam yakni sumber data yang dipublikasikan seperti laporan-laporan dari badan-badan nasional maupun internasional dan data yang tidak dipublikasikan dapat berupa data arsip pemerintah, data pada lembaga-lembaga penelitian baik

⁹⁰Lind, Marchal Dkk, *Tekhnik-Tekhnik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Edisi 15 Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat 2016), h. 10.

⁹¹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

⁹²Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

pemerintah maupu swasta.⁹³ Dimana dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersumber dari jurnal, web resmi, dan laporan tahunan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala rasio. Pada kenyataannya seluruh data kuantitatif dihitung dalam tingkat pengukuran rasio. Pemeringkatan rasio merupakan tingkat pengukuran tertinggi yang memiliki seluruh pemeringkatan interval, namun bedanya titik “0” memiliki makna dan rasio antara kedua angka juga bermakna. Pemeringkatan data rasio memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Penggolongan data disusun menurut jumla karakteristik yang mereka miliki.
- b. Selisih yang sama dalam karaktersitik ditunjukkan oleh selisih yang senilai pada angka-angka yang tertera dalam golongan.
- c. Titik nol merupakan tidak adanya karakteristik dan rasio antara dua angka memiliki makna.⁹⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode.

1. Dokumentasi

⁹³Nugroho Boedijoewono, *Pengantar Statistika Ekonomi Dan Bisnis Jilid 1*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 18-19.

⁹⁴Lind, Marchal Dkk, *Tekhnik-Tekhnik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Edisi 15 Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat 2016), h. 10.

Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, dan mencatat yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.⁹⁵

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.⁹⁶

Populasi yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah laporan data pajak reklame dan pajak restoran tujuh tahun dari tahun 2012-2018 selama penerapan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

⁹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Op.Cit.* h.157

⁹⁶ Suharisimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rhineka Cipta, 2013), h. 173

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel bertujuan atau *puspositive sampling*. Penentuan sampel ini berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi⁹⁷, yaitu:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi harus dilakukan dengan cermat.

Dalam hal ini penulis menggunakan sampel 7 tahun terakhir yaitu tahun 2012-2018.

E. Devinisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya.⁹⁸

- a. Variabel Terikat (variabel dependen)

⁹⁷ *Ibid*, h.183

⁹⁸ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.3

Variable terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (Y).

b. Variabel Bebas (variabel independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.⁹⁹

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak reklame (X1) dan pajak restoran (X2).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan penulis pada penelitian kali ini adalah metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif atau penalaran deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

1. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut :

⁹⁹ Sugiyono, *Ibid*, h. 4.

a. Deteksi Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* (metode grafik) atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.¹⁰⁰

Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu :

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah normal
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah tidak berdistribusi secara normal.

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal *Probability Plots* dalam program SPSS, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

¹⁰⁰ Imam Ghazali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponogoro, 2011), h. 173.

tidak memenuhi asumsi normalitas.¹⁰¹

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu korelasi antara nilai variabel dengan nilai variabel yang sama pada lagi satu atau lebih sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson, dengan hipotesis adalah:

$$H_0 : \rho_1 = 0$$

$$H_1 : \rho_1 \neq 0$$

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.¹⁰²

c. Multikolineritas

Tujuan uji ini tidak boleh terdapat multikolineritas di antara variabel penjelas pada model tersebut yang diindikasikan oleh hubungan yang sempurna atau hubungan yang tinggi diantara beberapa atau keseluruhan variabel penjelas. Pengujian ada tidaknya multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF).

¹⁰¹ Singgih Santoso, *Statisti parametik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 393

¹⁰² Bambang Suharjo, *Statistika Terapan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.115

Jika nilai VIF tidak melebihi 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya.¹⁰³

d. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi tujuan dilakukan uji ini adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya Heteroskedastisitas.¹⁰⁴

2. Analisis regresi linier berganda

Untuk alat uji hipotesis peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).¹⁰⁵

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Y adalah variabel dependen (terikat). X adalah variabel independen (bebas).

Keterangan :

Y = pendapatan asli daerah

X₁ = pajak reklame

¹⁰³ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010), h. 249.

¹⁰⁴ Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.63.

¹⁰⁵ Husaini Usman, Setiadi, *Pengantar Statistika* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h.241.

X_2 = pajak restoran

a = konstanta

B = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat dari perubahan tiap-tiap unit variabel bebas

e = standar error

3. Uji statistik

a. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan langkah membandingkan dari T_{hitung} dengan T_{tabel} .¹⁰⁶ Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

4) H_0 : Pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

H_a : Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

5) H_0 : Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

H_a : Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

¹⁰⁶ Imam Ghazali, *Aplikasi* h. 98.

- 1) Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Uji Ketepatan model (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan di dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya. Jika nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 5% maka variabel independen akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan sebaliknya.¹⁰⁷ Uji F dilakukan dengan langkah membandingkan dari F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F_{hitung} dapat dilihat dari hasil pengolahan data bagian Anova. Langkah-langkah pengujian hipotesis simultan dengan menggunakan uji F, berikut Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

- 1) H_0 : Pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

¹⁰⁷ Imam Ghazali, *Aplikasi.....* h. 98.

- 2) H_a : Pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- 1) Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan variabel-variabel dependen. Akan tetapi penggunaan koefisien determinasi tersebut memiliki suatu kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Supaya terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai adjusted R^2 , dimana nilai adjusted R^2 mampu meningkat atau menurun apabila terjadi

penambahan satu pada tiap variabel independen.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi* h. 87.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak antara $104,92^{\circ}$ sampai dengan $105,34^{\circ}$ Bujur Timur dan $5,12^{\circ}$ sampai dengan $5,84^{\circ}$ Lintang Selatan. Secara umum memiliki iklim tropis sebagaimana iklim Provinsi Lampung pada umumnya, curah hujan berkisar antara $152,98 \text{ mm}^3/\text{bulan}$, suhu udara rata-rata sebesar $26,69^{\circ}\text{C}/\text{bulan}$ dan kelembaban udara rata-rata sebesar $78,06\%/\text{bulan}$.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, maka wilayah administrasi Kabupaten Pesawaran mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung dan Lampung Tengah

Andan Jejama adalah Motto kehidupan masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki arti memelihara atau menjaga dengan baik secara bersama-sama. Dalam konteks pembangunan, pemerintahan atau pemanfaatan potensi-potensi daerah mempunyai arti : melaksanakan secara baik melalui skiap kebersamaan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersama-sama memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai.

Luas Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah 117.377 Ha dengan Kecamatan Negeri Katon sebagai kecamatan terluas yaitu 15.269 Ha. Dari luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 15.465 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 101.912 Ha merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah tagal/kebun.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Selayang Pandang Kabupaten Pesawaran 2019*, h.3 (Dinas Komunikasi dan Informatika)

2. Perekonomian Kabupaten Pesawaran

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,50% menunjukkan kenaikan diatas pertumbuhan ekonomi provinsi lampung tahun 2018 sebesar 5,25%. Menggambarkan meningkatnya kinerja perekonomian daerah.¹¹⁰

b. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator yang cukup relevan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yaitu besarnya PDRB per kapita. Dengan melihat PDRB perkapita atas dasar harga konstan (ADHK), dapat diketahui besarnya pendapatan riil setiap individu pertahun. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 adalah sebesar 13,99 Triliun rupiah.¹¹¹

3. Infrastruktur Kabupaten Pesawaran

Pemerintah Kabupaten Pesawaran menghasilkan banyak kemajuan di bidang infrastruktur guna meningkatkan geliat perekonomian masyarakat di bidang pertanian serta pariwisata dan barang tentu menunjang kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya dan politik.

Pembangunan Lampung Astronomical Observatory dibangun diatas Gunung Betung ditargetkan pertengahan tahun 2019. Adapun

¹¹⁰ *Ibid*, h.12

¹¹¹ *Ibid*, h.12

pembangunan monumen sebagai simbol di setiap area kawasan penting bumi andan jejama antara lain :

a. Tugu Pengantin

Simbol kerukunan masyarakat adat Pepadun dan Sai Batin.

Lokasi: Gedong Tataan

b. Tugu P3KP

Simbol penghargaan kepada Panitia Pelaksana Persiapan

Kabupaten Pesawaran (P3KP). Lokasi: Jalur Masuk

Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran

c. Tugu Coklat (Kakao)

Simbol Kawasan Hortipark (Andan Jejama Park) yang juga

menjadi kawasan Wisata Kakao dan sarana edukasi

masyarakat. Lokasi: Jalan Baru Desa Negeri Sakti Kec.

Gedong Tataan

d. Tugu Al Qur'an dan Ka'bah

Simbol kawasan Pendidikan Agama Islam Terpadu. Lokasi:

Pondok Pesantren Darrul Huffaz Desa Bernung Kec. Gedong

Tataan

e. Tugu Nemo

Simbol kawasan Wisata Bahari wilayah pesisir Kabupaten

Pesawaran. Lokasi: desa Hurun Kec. Teluk Pandan.¹¹²

¹¹² *Ibid*, h.4

4. Pemerintahan Kabupaten Pesawaran

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil bupati yang menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten Pesawaran. Selain itu, dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari 1 Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli Bupati, 3 Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, dan 11 bagian lainnya. Lebih dari itu untuk melayani masyarakat Kepala Daerah juga dibantu 22 Dinas Daerah, 9 Badan Daerah, 2 Sekretariat, 11 Pemerintah Kecamatan dan 148 Pemerintah Desa.¹¹³

Tabel 4.1
Daftar Bupati Pesawaran Beserta Periode Jabatan

No.	Nama Bupati	Periode Jabatan
1.	Drs. H. Haris Fadilah, M.M	2 Nov 2007 – 1 Nov 2008
2.	Djunaidi Djaya, S.H., M.H	24 Nov 2008 – 23 Okt 2009
3.	Drs. H. Haris Fadilah, M.M	24 Nov 2009 – 2 Mei 2010
4.	Drs. Untung Subroto	3 Mei 2009 – 19 Sept 2010
5.	Aries Sandi Darma Putra, SH., M.H	Periode 2010 – 2015
6.	Drs. H. Paryanto, M.M	21 Sept 2015 – 16 Feb 2016
7.	H. Dendi Ramadhona K, S.T	Periode 2016 – 2021

Sumber: Selayang Pandang Bumi Andan Jejama, Semarak Pesawaran 2017

5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 tahun

¹¹³ *Ibid*, h.17

2007. Pada tahun 2013 berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran. Tahun 2017 Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran berubah nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Adapun Visi dan Misi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pesawaran:

Visi: “Profesional dalam Pengelolaa Pendapatan Daerah, Prima dalam Pelayanan”.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas dan professional petugas pelayanan pajak daerah
- b. Melaksanakan tertib administrasi pelayanan pajak daerah
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah

- d. Mengembangkan pelayanan pajak daerah berbasis informasi teknologi.¹¹⁴

B. Gambaran Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018”. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu mulai tahun 2012 sampai dengan 2018. Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) SPSS 22.0 dengan metode uji prasyarat, uji hipotesis, dan regresi sederhana. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum pajak reklame dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.

1. Pajak Reklame

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pesawaran tahun 2012-2018, yakni:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak reklame tahun 2012-2018

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	(%)
2012	50.000.000,00	73.034.712,00	146,07
2013	50.000.000,00	82.171.750,00	164,34
2014	60.000.000,00	70.305.250,00	117,18
2015	70.000.000,00	70.515.000,00	100,74
2016	200.000.000,00	131.738.750,00	65,87
2017	200.000.000,00	237.250.549,00	118,63
2018	220.000.000,00	277.375.967,00	126,08

¹¹⁴ Website Resmi SIMPEG & SIM-SKP Bapenda Kabupaten Pesawaran. Tersedia di simpeg.bapenda.pesawarankab.go.id diakses pada 27 Mei 2019.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa penerimaan dari realisasi pajak reklame mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.73.034.712,00 atau pada 146,07%, kemudian di tahun 2013 menjadi Rp.82.171.750,00 setara dengan 164,34%, lalu 2014 mengalami penurunan sehingga pada angka Rp.70.305.250,00 atau pada 117,18%. Di tahun 2015 sebesar Rp.70.515.000,00 atau sebesar 100,74 dan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame yakni sebesar Rp.131.738.750,00 atau dalam persentase turun sebesar 65,87%. Selanjutnya tahun 2017 sebesar 237.250.549,00 atau 118,63%, dan pada tahun 2018 sejumlah 277.375.967,00 atau setara dengan 126,08%.

2. Pajak Restoran

Tabel 4.3

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018**

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	(%)
2012	30.000.000,00	53.875.400,00	179,58
2013	35.000.000,00	47.165.500,00	134,76
2014	45.000.000,00	54.960.600,00	122,13
2015	50.000.000,00	59.708.800,00	119,42
2016	50.000.000,00	557.301.580,00	111,46
2017	2.000.000.000,00	1.964.962.159,00	115,59
2018	1.870.000.000,00	2.391.395.586,00	127,88

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (diolah)

Berdasarkan tabel 1.3, diketahui bahwa penerimaan dari realisasi pajak restoran Kabupaten Pesawaran cenderung fluktuasi, tahun 2012

sebesar 53.857.400,00 atau 179,58%. Ditahun 2013 sebesar 47.165.500,00 atau 134,76%, tahun 2014 sebesar 54.960.600,00 atau 122,13, tahun 2015 sebesar 59.708.800,00 atau 119,42. Ditahun 2016 pada angka 557.301.580,00 setara dengan 111,46 ditahun 2017 meningkat menjadi 1.964.962.159,00 atau 115,59% dan pada tahun 2018 pada angka 2.391.395.586,00 atau 127,88 persen.

3. Pendapatan Asli Daerah

Adapun data target dan realisasi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Pesawaran, pada penelitian ini di ambil tahun 2012-2018.

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2018

Tahun	Target	Realisasi PAD	%
2012	14.715.956.000,00	25.710.883.650,18	174,71
2013	21.198.863.735,00	25.933.059.036,15	122,33
2014	31.569.771.251,35	36.482.436.458,71	115,56
2015	38.677.844.000,00	37.060.018.724,80	95,82
2016	53.493.336.600,00	41.956.848.582,55	78,43
2017	117.466.148.333,00	98.532.397.923,87	83,88
2018	69.806.945.718,00	60.656.666.456,02	86,89

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (diolah)

Dapat kita lihat dari tabel diatas, pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran cenderung fluaktif dari tahun 2012 sampai dengan 2017, dan mengalami penurunan ditahun 2018. Pada tahun

2012 pada angka Rp.25.710.883.650,18 atau setara pada 174,71%, pada tahun 2013 sebesar Rp.25.933.059.036,15 setara dengan 122,33%, kemudian tahun 2014 sebesar Rp.36.482.436.458,71 atau 115,56%. Lalu pada tahun 2015 menjadi Rp.37.060.018.724,80 atau 95,82%, tahun 2016 sebesar Rp.41.956.848.582,55 pada angka 78,43%. Selanjutnya tahun 2017 sebesar 98.532.397.923,87 atau setara dengan 83,88% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sejumlah 60.656.666.456,02 yang setara pada 86,89%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dan melebihi target. Sedangkan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2015 sampai dengan 2018 realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran tetap mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun penerimaan realisasi tersebut tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

4. Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesawaran

Berikut kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran:

Tabel 4.5
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran
terhadap PAD Kabupaten Pesawaran Tahun 2012-2018 (rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	PAD Kabuapten Pesawaran
2012	73.034.712,00	53.875.400,00	25.710.883.650,18
2013	82.171.750,00	47.165.500,00	25.933.059.036,15
2014	70.305.250,00	54.960.600,00	36.482.436.458,71
2015	70.515.000,00	59.708.800,00	37.060.018.724,80
2016	131.738.750,00	557.301.580,00	41.956.848.582,55
2017	237.250.549,00	1.964.962.159,00	98.532.397.923,87
2018	277.375.967,00	2.391.395.586,00	60.656.666.456,02

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa secara nominal, penerimaan pajak reklame rata-rata mengalami kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun ada tahun dimana penerimaan pajak reklame mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran pada tahun 2013 mengalami penurunan disbanding tahun 2012, dan pada tahun 2014 sampai dengan 2018 realisasi penerimaan PAD terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dan PAD sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Beberapa metode uji normalitas yaitu

dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* (metode grafik) atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.¹¹⁵

Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu :

- a) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah normal
- b) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dan model regresi adalah tidak berdistribusi secara normal.

Hasil analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

¹¹⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*, (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponogoro, 2011), h. 173.

Tabel 4.6
Haji Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22427680
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.208
	Negative	-.193
Kolmogorov-Smirnov Z		.551
Asymp. Sig. (2-tailed)		.922

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji normalitas, pada tabel 4.6 diatas dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah sampel (N) sebesar 7 adalah 0,922. Dengan demikian, data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,906 > 0,05$ sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Beberapa yang sering digunakan adalah uji *durbin Watson*, uji dengan *run test*. Pada data ini akan digunakan uji dengan *run test* sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.07844
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	5
Z	.061
Asymp. Sig. (2-tailed)	.952

a. Median

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan output SPSS diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,952 lebih besar > dari 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa H_0 diterima. Jadi data digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

c. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji ini tidak boleh terdapat multikolinieritas di antara variabel penjelas pada model tersebut yang diindikasikan oleh hubungan yang sempurna atau hubungan yang tinggi diantara keseluruhan variabel penjelas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflating Factor* (VIF). Nilai tolerance $<0,1$ dan nilai VIF >10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37.903	41.851		.906	.416		
PAJAK REKLAME	1.805	.263	.612	6.857	.002	.034	29.518
PAJAK RESTORAN	2.666	.403	.591	6.620	.003	.034	29.518

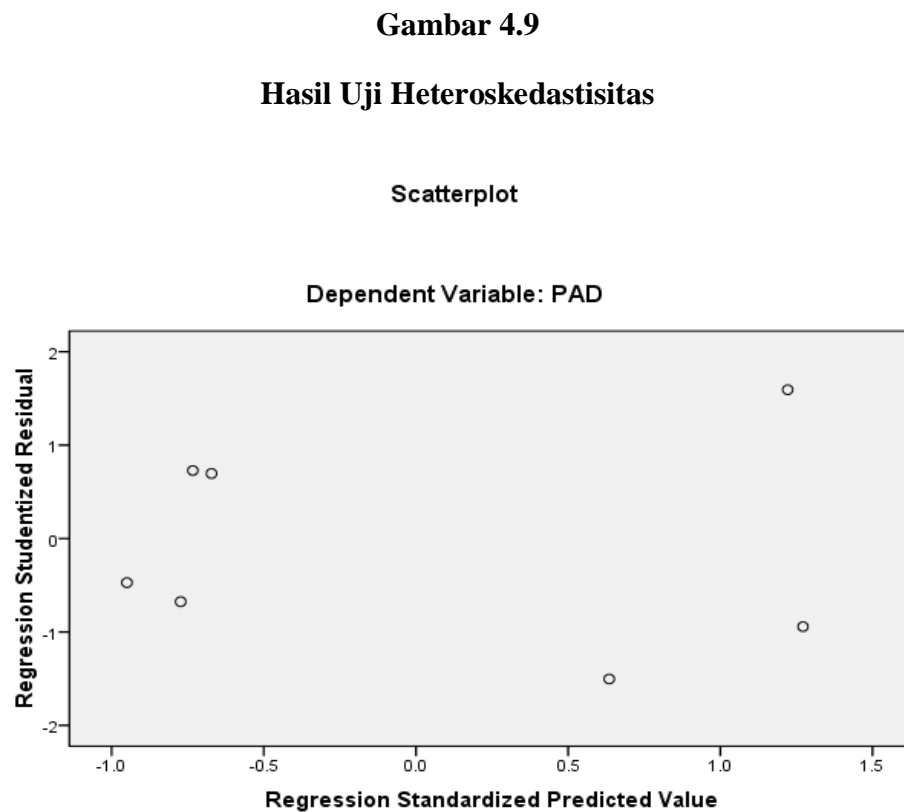
a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara masing-masing variabel independen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas bahwa variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari $<0,1$ yaitu 0,034 dan variabel independen VIF yang lebih dari >10 yaitu 29.518, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas.

d. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaa varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi tujuan dilakukan uji ini adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil *output* heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan output scatterplot diatas, terlihat bahwa titik menyebar dan tidak hanya mengumpul diatas atau dibawah serta tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Linear Berganda

Tabel 4.10
Hasil Uji Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.903	41.851		.906	.416
PAJAK REKLAME	1.805	.263	.612	6.857	.002
PAJAK RESTORAN	2.666	.403	.591	6.620	.003

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah SPSS 22

Pada prinsipnya model regresi linear merupakan suatu model yang parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2012-2016. Formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 37.903 + 1.805X_1 + 2.666X_2 + e$$

Dimana : α (konstanta) = 37.903

X_1 = pajak reklame

X_2 = pajak restoran

b_1 = 1.805

b_2 = 2.666

Dari persamaan regresi $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ menunjukkan bahwa $Y = 37.903 + 1.805X_1 + 2.666X_2 + e$. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta mempunyai arah koefisien regresi positif yaitu sebesar 37.903 menunjukkan apabila variabel lain mengalami peningkatan 1% maka variabel pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 37.903.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda koefisien regresi pada variabel 1 yaitu pajak reklame bertanda positif sebesar 1.805, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pajak reklame maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1.805%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Jika semakin

besar pajak reklame maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya jika pajak reklame menurun maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

- c. Berdasarkan persamaan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda koefisien regresi pada variabel 2 yaitu pajak restoran bertanda positif sebesar 2.666, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pajak reklame maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 2.666%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Jika semakin besar pajak restoran maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya jika pajak restoran menurun maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parametrik Individual (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan langkah membandingkan dari T_{hitung} dengan T_{tabel} . Uji t bertujuan untuk mengetahui peranan variabel independen yaitu pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Pesawaran. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- a) Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b) Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.903	41.851		.906	.416
PAJAK REKLAME	1.805	.263	.612	6.857	.002
PAJAK RESTORAN	2.666	.403	.591	6.620	.003

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pajak reklame berpengaruh dan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Pesawaran.

- 1) Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pajak reklame memiliki nilai t hitung sebesar 6.857 dengan sig. 0.002. Hal ini berarti bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($6.857 > 2.776$), serta nilai sig yang lebih kecil dari 0.05 ($0.002 < 0.05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran tahun 2012-2018.

- 2) Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pajak restoran memiliki nilai t hitung sebesar 6.620 dengan sig. 0.003. Hal ini berarti bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($6.620 > 2.776$), serta nilai sig yang lebih kecil dari 0.05 ($0.003 < 0.05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran tahun 2012-2018.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan di dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara yang digunakan adalah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikannya. Jika nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 5% maka variabel independen akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Uji F dilakukan dengan langkah membandingkan dari F_{hitung} dengan F_{tabel} . Nilai F_{hitung} dapat dilihat dari hasil pengolahan data bagian Anova. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	386160.778	2	193080.389	69.213	.001 ^a
	Residual	11158.650	4	2789.663		
	Total	397319.429	6			

a. Predictors: (Constant), RESTORAN, REKLAME

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah SPSS 22

Dari hasil uji signifikansi simultan (uji F) diatas menunjukkan nilai sig $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $69.213 > 5.79$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pajak reklame dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di anatar nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan variabel-variabel dependen. Akan tetapi penggunaan koefisien determinasi tersebut memiliki suatu kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Supaya terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai adjusted R^2 , dimana nilai adjusted R^2 mampu meningkat atau menurun apabila terjadi penambahan satu pada tiap variabel independen. Berikut hasil koefisien determinasi, yaitu:

Tabel 4.13
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.972	.958	52.81726

a. Predictors: (Constant), PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil pengamatan dari tabel 4.13, diketahui koefisien determinasi (R^2) adalah 0,972. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas dalam penelitian untuk menerangkan variabel terikat adalah sebesar 97,2%. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel pajak reklame dan pajak restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran

sebesar 97,2% sementara sisanya yakni 28,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2018

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Pemerintah memegang peran penting dalam suatu pembangunan daerah, salah satunya yakni melalui pajak reklame. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pajak reklame memiliki nilai t hitung sebesar 6.857 dengan sig. 0.002. Hal ini berarti bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($6.857 > 2.776$), serta nilai sig yang lebih kecil dari 0.05 ($0.002 < 0.05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran tahun 2012-2018.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran, yang secara langsung memberikan kenaikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kenaikan yang cukup signifikan sehingga realisasi penerimaan pajak reklame mencapai target. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nuzul Fitri dan Joko Rianto yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman. Dengan demikian pemerintah memegang peran penting dalam suatu pembangunan daerah, salah satunya yakni melalui pajak restoran. Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa variabel pajak restoran memiliki nilai t hitung sebesar 6.620 dengan sig. 0.003. Hal ini berarti bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($6.620 > 2.776$), serta nilai sig yang lebih kecil dari 0.05 ($0.003 < 0.05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran tahun 2012-2018.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dikarenakan dalam 7 tahun terakhir terjadi peningkatan setiap tahunnya sehingga realisasi penerimaan pajak restoran mencerminkan kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Elly Lilis Pujiastuti dan Joko Rianto yang menyatakan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesawaran Periode 2012-2018

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian pula dengan Indonesia, negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan pada suatu daerah demi terwujudnya pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang, maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pesawaran untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, balas jasa untuk suatu pelayanan dan keamanan dan juga mengatur konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial, sektor pajak yang merupakan pilihan yang sangat tepat selain karena jumlahnya yang relatif stabil dan juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi

kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Maka untuk memenuhi salah satu perwujudan daerah tersebut adalah dengan menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang sudah diatur dengan Undang-Undang, khususnya pajak reklame dan pajak restoran. Dengan demikian, hal ini sesuai dan sejalan dengan teori pembangunan. Teori ini menjelaskan bahwa, untuk Indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur. Pajak dipungut untuk pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.

Teori ini memandang bahwa pembangunan seperti itu tentunya tidak dapat dilakukan seperti membalikkan telapak tangan, pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya dan pengorbanan. Untuk itu negara maupun daerah memiliki keabsahan, wewenang untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Hal ini berdasarkan pula pada teori Adam Smith, yang terdapat pada buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang

ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims*, yaitu asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas pemungutan pajak, dan asas efisiensi. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., berpendapat, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak daerah terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah pajak reklame dan pajak restoran. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas penyelenggaraan restoran. Restoran adalah suatu tempat

atau bangunan yang di organisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman. Kemudian pajak tersebut dikenakan tarif sesuai objek dan jenisnya, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu kabupaten yang berada dipinggiran kota Bandar Lampung, yang berbatasan dengan daerah pinggiran kota lainnya seperti Hajimena, Pringsewu dan acuan daerah-daerah yang lainnya, Kabupaten Pesawaran merupakan lokasi strategis bagi para pelaku bisnis dalam melakukan produksi dan pemasaran produk, banyak strategi-strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dalam memperkenalkan barang atau jasa ke pasar, salah satu strategi yang dilakukan oleh pengusaha dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga penjualan dan pendapatan perusahaan meningkat serta memperluas pangsa pasar perusahaan adalah melalui pemasangan reklame. Dan juga banyaknya pelaku bisnis yang sangat jeli dalam melihat pangsa pasar dalam melakukan pembangunan restoran-restoran yang ada disepanjang jalan lintas Kabupaten Pesawaran.

Penggunaan pajak reklame dan pajak restoran salah satu pendapatan untuk daerah Kabupaten Pesawaran, dimana dengan penyelenggaraan tersebut dapat dipungut biaya pajak dari peningkatan wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran. Namun hal ini diperlukan optimalisasi

pemerintah daerah dalam menangani pemungutan dan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran guna meningkatkan pendapatan daerah serta agar sejalan dan terwujudnya dengan visi misi yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Dan dari persamaan regresi $Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$ menunjukkan bahwa $Y = 37.903 + 1.805x_1 + 2.666x_2 + e$. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa jika x_1 dan $x_2 = 0$ maka variabel pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 37.903%.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda koefisien regresi pada variabel 1 yaitu pajak reklame bertanda positif sebesar 1.805, artinya hasil penelitian menunjukkan setiap kenaikan 1% pajak reklame maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1.805%. Koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Jika semakin besar pajak reklame maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya jika pajak reklame menurun maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

c. Berdasarkan persamaan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linear berganda koefisien regresi pada variabel 2 yaitu pajak restoran bertanda positif sebesar 2.666, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% pajak reklame maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 2.666%. Hasil penelitian koefisien regresi bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Jika semakin besar pajak restoran maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan sebaliknya jika pajak restoran menurun maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

Dan dari hasil uji signifikansi simultan (uji F) diatas menunjukkan nilai sig $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $69.213 > 5.79$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini secara simultan atau bersama-sama dapat dinyatakan bahwa adanya sebuah pengaruh dari pemungutan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.

Penerimaan pajak reklame dan pajak restoran mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah hasilnya sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuzul Fitri tahun 2016 menyimpulkan secara simultan pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan Joko Rianto

tahun 2017 menyimpulkan bahwa secara simultan hasil dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 98,5% sedangkan sisanya 1,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis

Jika pengelolaan pajak reklame dan pajak restoran lebih diperhatikan, tidak menutup kemungkinan jika pajak reklame pajak restoran bisa menjadi salah satu pemasukan pajak daerah yang lebih besar dari pajak daerah yang lainnya karena mengingat Kabupaten Pesawaran merupakan daerah strategis yang menjadi sarana untuk berbisnis dan menjadi magnet bagi para pengusaha untuk memperkenalkan produknya. Dengan adanya reklame dan restoran, tentunya ini bisa membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah seperti halnya juga di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan potensi yang ada dan dimiliki wilayah tersebut, penerimaan pajak reklame dan pajak restoran ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan Kabupaten Pesawaran sangat bergantung dengan APBD yang disusun oleh pemerintah daerah terkait, yang mana dengan hal tersebut korelasi antara bagian pendapatan dengan pengelolaan pendapatan dapat melihat tolak ukur kemandirian suatu daerah khususnya di Kabupaten Pesawaran. Untuk itu perlu terobosan-terobosan baru dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai sektor yang bisa menjadi penyumbang dalam peningkatan PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pemungutan Pajak di Kabupaten Pesawaran

Dalam perspektif ekonomi islam, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan terhadap negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Pajak sendiri terdiri dari berbagai macam jenis, dan salah satunya adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh pribadi atau badan. Dalam pengertian tersebut yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang berlaku sama sebagai anggota kelompok masyarakat wajib membayar pajak.

Pemungutan pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi islam memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri dalam pemungutan pajak khususnya pajak reklame, seperti prinsip-prinsip yang ada dibuku Gusfahmi dengan judul Pajak menurut Syariah, hal ini dikarenakan setiap pendapatan negara islam harus berdasarkan nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadist

yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya, kemudian adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin, dan harus menjamin bahwa hanya golongan yang kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui¹¹⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang dasar pengenaan tarif nilai sewa reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak restoran, kebijakan pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai ulil amri yakni dengan penerapan Peraturan Bupati Pesawaran (PerBup) No.9 tahun 2017 tentang Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Pesawaran sudah termasuk dalam prinsip dasar hukum syariah karena kegiatan pemungutan pajak khususnya pajak reklame dan pajak restoran yang

¹¹⁶ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleena, 2013)

diterapkan sudah mempunyai dasar hukum yang sah yang telah mengatur dan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Kemudian, jika melihat prinsip keadilan dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame dan pajak restoran di Indonesia yang menerangkan bahwa pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal yang artinya harus sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di BAPENDA Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan prinsip pajak yang adil dalam islam. Pemungutan pajak reklame dan pajak restoran harus disesuaikan dengan kondisi wajib pajak atau sosial suatu kelompok.

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Begitupun untuk menyikapi kesalahan dan penyelewengan terhadap oknum yang kemudian diberikan tindakan korektif, diperlukan adanya sanksi agar pelanggar mendapatkan efek jera. Didalam islam pun mempunyai landasan apabila terjadi pelanggaran bagi para pelanggar atau pembangkang zakat, Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Fusilat ayat 6:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ



Artinya: Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jaolan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang empersekutukan-Nya.¹¹⁷

Jika hukuman tidak ditentukan oleh syara, maka ditetapkan oleh takzir yang di ijtihadkan oleh pemimpin. Dia harus menghukum orang kaya yang zalim yang tidak membayar zakat dengan hukuman penjara. Kemudian jika masih melakukan dihukum dengan cambuk hingga melakukan kewajibannya. Di Kabupaten Pesawaran sanksi yang diberikan pemerintah daerah kepada para oknum yang memasang reklame tanpa izin, sudah izin tidak mau melunasi atau mengangsur dan menunda pembayaran pajak, yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam Al-Qur'an dan sunnah rasulullah, yaitu dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Kemudian beban tidak boleh sama sehubungan dengan kemampuan orang yang memikulnya. Dalam pemungutan pajak reklame di beban yang diberikan kepada wajib pajak berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari wajib pajak itu sendiri. Pajak dipungut untuk membiayai apa yang dipandang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *Maqasid Syariah*, dalam hal ini pemungutan pajak di Kabupaten

¹¹⁷ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleena, 2013)

Pesawaran sesuai dengan prinsip ajaran islam karena dana yang terkumpul dari pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Pesawaran yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan umat serta menciptakan masyarakat yang *Maqasid Syariah*.

Dalam perspektif ekonomi islam yang harus ditaati oleh ulil amri dalam pemungutan pajak khususnya pajak reklame dan pajak restoran sebagai pendapatan asli daerah kabupaten Pesawaran tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak reklame dan pajak restoran yang sudah berdasarkan nash yang menjadi dasar pemungutan pajak reklame dan pajak restoran. Pemungutan pajak reklame dan pajak restoran sudah bersifat adil baik secara vertikal maupun horizontal, beban yang diberikan kepada wajib pajak pun berbeda dengan satu dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan wajib pajak, selain itu hasil dari pemungutan pajak di Kabupaten Pesawaran digunakan untuk pembangunan ekonomi Pesawaran yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan umat serta menciptakan masyarakat yang *Maqasid Syariah*. Dan untuk kedepan, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dapat lebih intens memantau reklame-reklame liar ataupun restoran yang belum memiliki izin ataupun menurunkan petugas agar turun kelapangan untuk melihat wajib pajak yang tidak menutup kemungkinan melakukan penyelewengan terhadap jumlah pajak yang direkayasa. Agar lebih

mampu meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis mengenai adakah pengaruh antara penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran periode 2012 sampai dengan 2018. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian yaitu:

1. Berdasarkan uji secara parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel pajak reklame dan pajak restoran dapat disimpulkan bahwa pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dikarenakan peningkatan baik secara jumlah dan kualitas pajak reklame dan pajak restoran secara langsung dapat mengukur pendapatan asli daerah, dimana terjadi perubahan atau perkembangan. Dengan demikian dari realisasi pajak reklame dan pajak restoran dalam kurun 7 tahun dapat terlihat dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.
2. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda, dapat dinyatakan secara simultan atau bersama-sama bahwa adanya pengaruh positif, dikarenakan pajak reklame dan pajak restoran bersama-sama setiap tahunnya mengalami kenaikan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran setiap tahunnya meningkat. Artinya apabila pajak reklame dan pajak restoran mengalami peningkatan satu

satuan maka akan mengalami peningkatan yang berdampak pada pendapatan asli daerah yang mencerminkan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Dalam ekonomi islam sistem pemungutan dalam penerimaan pajak di Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan prinsip pajak yang adil dalam islam. Pemungutan pajak sudah sesuai dengan kondisi wajib pajak atau sosial suatu kelompok. Serta dana yang terkumpul dari pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Pesawaran yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan umat serta menciptakan masyarakat yang *maqasid syariah*.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada pihak yang terkait antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pesawaran

Untuk mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tahap selanjutnya, maka dengan itu dilakukan melalui perbaikan administrasi, pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Pesawaran.

2. Masyarakat Kabupaten Pesawaran

Sebagai wajib pajak, sudah sepatutnya bertanggung jawab akan kewajiban membayar pajak khususnya pajak reklame dan pajak

restoran yang sudah diselenggarakan dengan pihak terkait. Sesuai dengan undang-undang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas periode penelitian dan menambah variabel pajak lainnya seperti pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Ataupun variabel yang terkait dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pesawaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharisimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2013.
- Atmodjo, M.W, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Boedijoewono, Nugroho, *Pengantar Statistika Ekonomi Dan Bisnis Jilid 1*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013.
- Djaenuri, Aries A, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Fitri, Nuzul, Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2014, *Jurnal Elektronik Umrah* 2016
- Gani, Irwan dan Siti Amalia, *Alat Analisis Data: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: ANDI, 2015.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, edisi revisi*, Bandung: Rajawali Pers, 2011.
- Hadi, Sasana, Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 18, No.1, 2011.
- Halim, Abdul. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Handi, Asep Saepul, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Hikmah, Analisis Kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, *Jurnal Of*

Government-JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah), Vol.2, No.2, 2017.

Huda, Nurul, *Keuangan Politik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.

<https://www.djpk.kemenkeu.go.id>

<https://jdih.pesawarankab.go.id>

<https://eprints.undip.ac.id>

<https://simpeg.bapenda.pesawarankab.go.id>

<https://staff.uui.ac.id>

Joko Rianto, Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten tangerang (Periode 2011-2015), *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.XXVII, Vol.2, 2017

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kosasi, Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang, *Majalah Ilmiah Solusi Uniska*, Vol. 1 Edisi 24, 2012.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Jakarta: Andi OFFSET, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Jakarta: Andi OFFSET, 2011.

Marchal, Lind, *Tekhnik-Tekhnik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Edisi 15 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Nasution, Mustofa Edwin et.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. ke-3*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta:Kencana, 2011.

Nugroho, Dwiarko, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja sektor Perhotelan dan Restoran di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.6, No.2, 2014.

Pandiangan, Liberty, *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di Indonesia*, Surabaya: Erlangga, 2014.

- Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Bupati Pesawaran, Nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran, Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran, Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
- Pujihastuti, Elly Lilis, Muhammad Tahwin, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, *JAB*, Vol.2 No.2, 2016.
- Purba, Rosanna Rika dan Mei Hayani Ginting, Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, *Jurnal Mutiara Akuntansi*, Vol.1, No.1, 2016.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sabil, Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat, *Jurnal Moneter*, Vol. IV, No.2, 2017.
- Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghallia Indonesia, 2003.
- Sari, Diana, *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Adimata, 2013.
- Selayang Pandang Kabupaten Pesawaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019.
- Siahaan, Maribot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekresno, *Management Food and Beverage, Service Hotel*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.
- Soemitro, Rachmat, *Azas dan Dasar Perpajakan*, Erosco. Bandung, 2008.

- Sripradita, Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri), *Jurnal e-Perpajakan*, No.1 Vol.1, 2014.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak Edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Sudarmanto, *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Solimun, *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarPLS*, Malang: UB Press, 2017.
- Turmudi, Muhammad, Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat), *Jurnal Al-'Adl*, Vol.8, No.1, 2015.
- Utomo, Marudi Margo dan Bambang Wiwoho, Pengaruh Retribusi Pasar dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol.2, No.1, 2017.
- Waluyo, *Perpajakan Teori dan Kasus, edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Haji Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22427680
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.208
	Negative	-.193
Kolmogorov-Smirnov Z		.551
Asymp. Sig. (2-tailed)		.922

- a. Test distribution is Normal.

Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.07844
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	5
Z	.061
Asymp. Sig. (2-tailed)	.952

a. Median

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

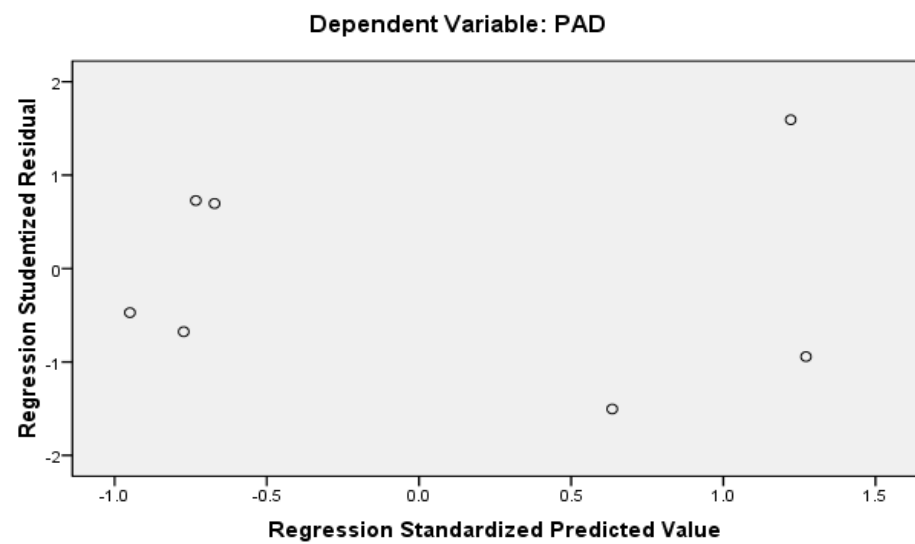
Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	37.903	41.851		.906	.416		
PAJAK REKLAME	1.805	.263	.612	6.857	.002	.034	29.518

PAJAK RESTORAN	2.666	.403	.591	6.620	.003	.034	29.518
-------------------	-------	------	------	-------	------	------	--------

a. Dependent Variable: PAD

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



Hasil Uji Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.903	41.851		.906	.416
PAJAK REKLAME	1.805	.263	.612	6.857	.002

PAJAK RESTORAN	2.666	.403	.591	6.620	.003
-------------------	-------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: PAD

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	37.903	41.851		.906	.416
PAJAK REKLAME	1.805	.263	.612	6.857	.002
PAJAK RESTORAN	2.666	.403	.591	6.620	.003

a. Dependent Variable: PAD

Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	386160.778	2	193080.389	69.213	.001 ^a
Residual	11158.650	4	2789.663		
Total	397319.429	6			

a. Predictors: (Constant), RESTORAN, REKLAME

b. Dependent Variable: PAD

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.972	.958	52.81726

a. Predictors: (Constant), PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME

b. Dependent Variable: PAD